



PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

LAPORAN KINERJA

TAHUN
2025

KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja merupakan kewajiban konstitusional bagi setiap perangkat daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Dokumen ini disusun secara sistematis dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, serta diselaraskan dengan standar evaluasi terkini yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021.

Laporan ini merupakan manifestasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara. Ruang lingkup laporan ini mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, statistik sektoral, serta persandian, yang secara strategis diproyeksikan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029.

Secara substansial, Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas formal yang mengintegrasikan aspek perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan tugas dalam satu kerangka pelaporan yang komprehensif. Dokumen ini berperan sebagai parameter penilaian kinerja yang objektif sekaligus manifestasi transparansi publik, yang bertujuan untuk mengakselerasi transformasi tata kelola pemerintahan menuju prinsip *Good Governance*. Melalui pelaporan yang kredibel, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara berupaya memperkuat legitimasi kelembagaan dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani.

Di sisi lain, akurasi capaian kinerja dalam laporan ini didasarkan pada metodologi pengukuran yang rigid melalui Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator tersebut merupakan variabel kritikal yang merepresentasikan derajat keberhasilan sasaran strategis sebagaimana yang telah dikomitmenkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dengan menyelaraskan realisasi program terhadap target IKU, dokumen ini menyajikan evaluasi yang berbasis data (*data-driven*) guna memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan

berkontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Hasil analisis dan evaluasi yang termaktub dalam laporan ini diharapkan dapat menjadi rujukan strategis dalam mengoptimalkan peran kelembagaan, serta meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas aparatur. Upaya ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan kami dalam Meningkatkan Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital demi Meningkatkan Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat.

Batu Bara, Januari 2026
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BATU BARA

ELPANDI, S.Ag., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 197412212010011005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
1. Kedudukan dan Susunan	2
2. Rincian Tugas.....	3
C. ISU-ISU STRATEGIS	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	6
A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI	6
B. PERJANJIAN KINERJA	8
C. RENCANA ANGGARAN	9
BAB III AKUNTIBILITAS KINERJA	13
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	13
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025.....	13
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir	15
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi	17
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.....	19
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	23
B. REALISASI ANGGARAN	24
BAB IV PENUTUP	30

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

Implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mengamanatkan pengembangan sistem pertanggungjawaban yang komprehensif, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut memerlukan standarisasi pengukuran kinerja yang bersifat valid dan reliabel guna memastikan penyelenggaraan pemerintahan serta akselerasi pembangunan daerah terlaksana secara efisien, efektif, dan kredibel. Penguatan sistem akuntabilitas ini merupakan upaya strategis dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, profesional, serta berintegritas tinggi, sekaligus sebagai instrumen preventif terhadap segala bentuk penyimpangan administratif dan korupsi.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 merupakan dokumen manifestasi pertanggungjawaban institusional atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama satu periode anggaran. Dokumen ini mengintegrasikan seluruh capaian pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang komunikasi dan informatika, pengelolaan statistik sektoral, serta penyelenggaraan urusan persandian sebagai pilar pengamanan informasi di tingkat daerah. Selain itu, laporan ini menyajikan analisis mendalam mengenai optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang dikonversikan menjadi output dan outcome berdasarkan perencanaan strategis yang telah ditetapkan.

Parameter keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara diukur melalui evaluasi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan representasi kuantitatif dari keberhasilan pencapaian sasaran strategis. Evaluasi ini dilakukan secara komparatif terhadap target yang telah disepakati dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Seluruh capaian kinerja tersebut dikonstruksikan berdasarkan korelasi antara perencanaan kerja dan alokasi sumber daya finansial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025, sehingga memberikan gambaran objektif mengenai efektivitas penggunaan anggaran negara.

Berdasarkan pedoman normatif Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja ini merupakan entitas akuntabilitas publik atas delegasi wewenang dan penggunaan anggaran yang dikelola oleh instansi pemerintah. Proses penyusunan laporan ini melibatkan metodologi pengukuran yang sistematis, evaluasi performa, serta pengungkapan (disclosure) secara komprehensif terhadap hasil analisis kinerja. Laporan ini memberikan potret faktual mengenai progresivitas pencapaian tujuan strategis sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 melalui program-program akselerasi yang dilaksanakan sepanjang tahun 2025.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kabupaten Batu Bara Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Batu Bara. Dalam Peraturan Bupati ini telah ditetapkan kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara sebagai berikut:

1. Kedudukan dan Susunan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat; terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian,
 2. Subbagian Keuangan,
 3. Tim Substansi program
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik; terdiri dari:
 1. Tim Substansi Hubungan Masyarakat,

2. Tim Substansi Informasi Publik dan Dokumentasi
- d. Bidang Aplikasi Informatika; terdiri dari:
 1. Tim Substansi Tata Kelola Aplikasi Informatika dan Infrastruktur Teknologi Informasi,
 2. Tim Substansi Tata Kelola Ekosistem E-Government.
- e. Bidang Persandian dan Statistik; terdiri dari:
 1. Tim Substansi Persandian dan Keamanan Informasi,
 2. Tim Substansi Statistik Sektoral.
- f. Unit Pelaksana Teknis;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

2. Rincian Tugas

- a. Kepala Dinas
Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika, bidang statistik serta bidang persandian dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
- b. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika yang meliputi perencanaan/evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, urusan umum kepegawaian, serta program.
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
Bidang Informasi dan Komunikasi Publik dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pengelolaan media publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan kemintraan dengan pemangku kepentingan.
- d. Bidang Aplikasi Informatika
Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang melaksanakan tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang layanan

infrastruktur dasar data center, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah.

e. Bidang Persandian dan Statistik

Bidang Persandian dan Statistik dipimpin oleh seorang Kepala. Kepala Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan, peraturan teknis, koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi dan di bidang penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan pemerintah daerah.

C. ISU-ISU STRATEGIS

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi urusan bidang komunikasi dan informatika, urusan bidang statistik dan urusan bidang persandian diantaranya:

1. Optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan *Smart City* di Pemerintah Kabupaten Batu Bara
2. Implementasi *Data Driven-Government*
3. Optimalisasi pengelolaan pusat data pemerintah yang terstandar
4. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Batu Bara
5. Penataan, pengendalian dan pengawasan infrastruktur pasif telekomunikasi
6. Penguatan keamanan data dan informasi Pemerintah Kabupaten Batu Bara
7. Penguatan ekosistem digital di Kabupaten Batu Bara
8. Pembentukan dan penguatan kelompok informasi masyarakat (KIM)
9. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses

10. Peningkatan persepsi positif publik terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Batu Bara
11. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS ORGANISASI

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan bidang komunikasi dan informasi publik, aplikasi informatika, statistik sektoral, dan persandian untuk pengamanan informasi kabupaten yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat untuk kurun waktu tahun 2025-2029.

Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029 **“Mewujudkan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan, Amanah, Harmonis, Akuntabel, Giat, Inovatif dan Adil Untuk Batu Bara Yang Bahagia”**. Berdasarkan visi tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara ditetapkan Misi **“Mewujudkan Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Berorientasi Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat dan Mewujudkan Tata Pemerintahan Kabupaten Batu Bara yang Akuntabel dalam Melaksanakan Tugas dengan Jujur, Bertanggungjawab, Cermat, Disiplin, dan Berintegritas Tinggi”**.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Bupati Batu Bara yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029 maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara menetapkan tujuan Meningkatnya Tata Kelola Informasi Publik dan Ekosistem Pemerintahan Digital dalam Memenuhi Kebutuhan Masyarakat, dengan sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Sasaran-1 : Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;

Dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan sasaran strategis "Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik", ditetapkan indikator kinerja utama berupa Indeks Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik. Indikator ini merupakan parameter objektif yang merepresentasikan derajat kepatuhan dan kualitas transparansi badan publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pengukuran capaian indikator tersebut didasarkan pada hasil penilaian formal yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Sumatera Utara. Melalui mekanisme Monitoring dan Evaluasi (Monev) secara periodik, hasil tersebut memberikan potret faktual mengenai efektivitas pengelolaan dan pelayanan informasi yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara. Skor yang diperoleh dari hasil Monev ini menjadi rujukan utama dalam mengevaluasi implementasi keterbukaan informasi, sekaligus menjadi basis data dalam menentukan strategi peningkatan kualitas tata kelola informasi publik pada periode mendatang.

Strategi yang ditempuh melalui Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Arah Kebijakan :

- 1) Pengembangan layanan keterbukaan informasi yang cepat dan responsif;
 - 2) Penyelenggaraan literasi digital secara berkelanjutan;
 - 3) Penyebarluasan Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik.
2. Sasaran-2 : Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ditetapkan indikator kinerja Indeks SPBE berupa nilai Hasil Evaluasi SPBE oleh Kemeterian PAN-RB. strategi yang ditempuh, yaitu :
- 1) Peningkatan Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 2) Peningkatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Arah kebijakan :

- 1) Penyempurnaan kebijakan internal SPBE dan penguatan regulasi pendukung;
 - 2) Integrasi data dan sistem antar perangkat;
 - 3) Implementasi standar keamanan informasi ISO 27001;
 - 4) Peningkatan kapasitas sumber daya persandian;
3. Sasaran-3 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektorial;

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik Sektoral Untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral ditetapkan indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik (IPS) berupa nilai IPS hasil evaluasi pembangunan statistik oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Indeks Satu Data Indonesia (SDI) dari Bappenas RI. Strategi yang ditempuh antara lain:

Peningkatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
Arah Kebijakan :

- 1) Standarisasi format dan metadata data sektoral;
 - 2) Optimalisasi portal satu data daerah;
 - 3) Meningkatkan Pembinaan Penyelenggaraan Statistik Sektoral PD.
4. Sasaran-4 : Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Meningkatnya Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Untuk mengukur keberhasilan sasaran Meningkatkan Tata Kelola Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara ditetapkan indikator kinerja berupa Nilai Evaluasi AKIP hasil penilaian evaluasi AKIP oleh Inspektorat Kabupaten Batu Bara.

Strategi yang ditempuh adalah Peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah termasuk transparansi dan tata kelola pemerintahan.

Arah Kebijakan :

- 1) Peningkatan kualitas layanan dan optimalisasi sumber daya Perangkat Daerah dalam menciptakan pelayanan prima.
- 2) Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Kominfo.
- 3) Meningkatkan kualitas kinerja pegawai Dinas Kominfo.
- 4) Optimalisasi perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan Perangkat Daerah.

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Penyusunan penetapan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD). Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Target Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7 (Baik)
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90 (Informatif)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75,25 (BB)
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,40 (Cukup)
		Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	30

C. RENCANA ANGGARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Batu Bara melalui Dinas Komunikasi dan Informatika melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batu Bara, dengan total belanja urusan wajib yang diperjanjikan kinerja sebesar Rp.11.997.567.273. Adapun komposisi dari anggaran pembiayaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025

NO.	URAIAN	PAGU	%
1	Belanja Pegawai	Rp.2.938.339.244	24,49
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp.6.525.195.029	54,39
3	Belanja Hibah	Rp.35.000.000	0,29
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.2.489.034.000	20,75
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.9.999.000	0,08

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rencana Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Berdasarkan Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2025

SASARAN STRATEGIS		PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Rp765.993.600,00
	1.1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp765.993.600,00
	1.1.1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp72.793.600,00
	1.1.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Rp279.000.000,00
	1.1.3	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp273.004.000,00
	1.1.4	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Rp40.000.000,00
	1.1.5	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Rp5.292.000,00
	1.1.6	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Rp95.904.000,00
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Rp171.625.000,00
	2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp171.625.000,00
	2.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp171.625.000,00
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Rp3.130.340.550,00
	3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp3.130.340.550,00
	3.1.1	Relasi Media	Rp1.570.800.000,00
	3.1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp53.822.000,00
	3.1.3	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Rp230.000.000,00
	3.1.4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp517.852.550,00

	3.1.5	Penyusunan Konten	Rp757.866.000,00
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Rp51.500.000,00
	4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp51.500.000,00
	4.1.1	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	Rp51.500.000,00
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp7.878.108.123,00
	5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp1.350.000,00
	5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp900.000,00
	5.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp450.000,00
	5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp2.939.914.244,00
	5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.938.339.244,00
	5.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp1.575.000,00
	5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp446.331.357,00
	5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.447.760,00
	5.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp35.463.373,00
	5.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp55.552.000,00
	5.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp3.580.224,00
	5.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp173.400.000,00
	5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp175.888.000,00
	5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp2.447.273.000,00
	5.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp85.440.000,00
	5.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp2.361.833.000,00
	5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp1.660.947.522,00
	5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp2.000.000,00
	5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp155.827.522,00
	5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.503.120.000,00
	5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp382.292.000,00
	5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp50.920.000,00
	5.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp181.615.000,00
	5.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp54.750.000,00
	5.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp95.007.000,00
		JUMLAH ANGGARAN 2024	Rp11.997.567.273,00

Alokasi anggaran tahun 2025 disusun secara proporsional untuk mendukung pencapaian empat sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pendanaan ini difokuskan pada belanja urusan wajib bidang komunikasi dan informatika, persandian untuk pengamanan informasi, serta statistik sektoral.

Secara operasional, anggaran pada Sasaran Strategis 1 diarahkan untuk penguatan infrastruktur digital dan pemeliharaan aplikasi terintegrasi guna mendongkrak indeks SPBE ke kategori 'Baik'. Sementara itu, pada Sasaran Strategis 2, anggaran dialokasikan untuk optimalisasi kanal informasi publik dan layanan PPID agar standar keterbukaan informasi mencapai predikat 'Informatif'.

Pada aspek manajemen internal, pendanaan pada Sasaran Strategis 3 mendukung penguatan sistem pengawasan dan pelaporan kinerja guna memastikan akuntabilitas instansi berada pada level 'BB'. Terakhir, alokasi untuk Sasaran Strategis 4 diprioritaskan pada penyusunan metadata statistik sektoral dan integrasi basis data daerah ke dalam kerangka Satu Data Indonesia. Melalui sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan sasaran kinerja ini, diharapkan efisiensi penggunaan keuangan daerah dapat berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik digital di Kabupaten Batu Bara.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara sesuai dengan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas dengan menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan ini menggambarkan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun 2025-2029, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Secara umum, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara berhasil mencapai dan melampaui sebagian besar target kinerja yang ditetapkan pada tahun 2025. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,7 (Baik)	2,74 (Baik)	101,48
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90 (Informatif)	90 (Informatif)	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75,25 (BB)	75,25 (BB)	100
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,40 (Cukup)	N/A	-
		Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	30	42,65	142,16

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai capaian indikator tersebut:

- Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE): Realisasi Indeks SPBE mencapai 2,74, melampaui target 2,7. Keberhasilan ini didukung oleh optimalisasi anggaran pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp749.578.636.
- Keterbukaan Informasi Publik: Capaian sebesar 90 (Informatif) sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal ini selaras dengan penyerapan anggaran yang sangat tinggi pada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (99,95%) yang mencapai Rp3.128.905.555.
- Akuntabilitas Kinerja (AKIP): Realisasi nilai 75,25 (BB) menunjukkan konsistensi dalam manajemen kinerja, didukung oleh Program Penunjang dengan total realisasi (Belanja Operasi & Modal) sebesar Rp7.751.881.144.
- Satu Data Indonesia (SDI): Terjadi peningkatan signifikan pada Indeks SDI dengan realisasi 42,65 dari target 30 (capaian 142,16%). Hal ini merupakan hasil dari efisiensi Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang menyerap anggaran Rp51.131.000.

Terdapat korelasi positif antara penyerapan a

nggaran sebesar Rp11.846.800.810 (98,74% dari pagu) dengan capaian kinerja organisasi. Tingginya capaian pada Indeks SDI dan terlampauinya target Indeks SPBE membuktikan bahwa alokasi anggaran modal sebesar Rp2.378.340.169 telah digunakan secara efektif untuk penguatan infrastruktur dan aplikasi penunjang kinerja.

Indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) pada tahun 2025 menunjukkan hasil n/a (tidak tersedia) dikarenakan kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2025 resmi tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Keputusan ini didasarkan pada surat pemberitahuan BPS Nomor: B-236/02000/TS.160/2025 yang merujuk pada Pasal 7 Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022, di mana EPSS dilaksanakan dua tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Menindaklanjuti kebijakan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara memfokuskan upaya pada pembinaan statistik yang lebih intensif sesuai dengan rekomendasi EPSS tahun sebelumnya. Hal ini terbukti

dengan peningkatan signifikan pada indikator Indeks Satu Data Indonesia (SDI) yang mencapai nilai 42,65, melampaui target yang ditetapkan sebesar 30. Dengan demikian, meskipun penilaian IPS secara formal ditiadakan oleh instansi pembina pusat, fungsi penyelenggaraan statistik sektoral di daerah tetap berjalan secara optimal dan akuntabel.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Berikut adalah penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara tahun 2025, lengkap dengan analisis perbandingan data historis periode 2021–2025:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	REALISASI				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,96 (Cukup)	2,18 (Cukup)	2,34 (Cukup)	2,67 (Baik)	2,74 (Baik)
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	80 (Menuju Informatif)	90 (Informatif)	90 (Informatif)	90 (Informatif)	90 (Informatif)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	71,07 (BB)	74 (BB)	70,91 (BB)	72,86 (BB)	75,25 (BB)
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	n/a	1,7 (Kurang)	1,33 (Kurang)	2,33 (Cukup)	n/a
		Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	n/a	n/a	n/a	29,10 (Sangat Kurang)	42,65 (Kurang)

1) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.**

Indikator Kinerja: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Realisasi 2025: 2,74 (Kategori: Baik). Capaian Kinerja: 101,48% dari target 2,70.

Analisis Perbandingan:

Tahun Lalu (2024): Mengalami peningkatan dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 2,67. Beberapa Tahun Terakhir: Indikator ini menunjukkan tren kenaikan yang stabil dan konsisten, dimulai dari 1,96 (2021), 2,18 (2022), dan 2,34 (2023).

Faktor Pendukung: Peningkatan ini didukung oleh alokasi anggaran pada Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan realisasi sebesar Rp749.578.636, dukungan belanja modal infrastruktur serta peningkatan indikator layanan SPBE diantaranya Layanan administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis elektronik.

2) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik.**

Indikator Kinerja: Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Realisasi 2025: 90 (Kategori: Informatif). Capaian Kinerja: 100,00% dari target 90.

Analisis Perbandingan:

Tahun Lalu (2024): Capaian sama dengan tahun 2024, yakni skor 90. Beberapa Tahun Terakhir: Organisasi berhasil mempertahankan predikat "Informatif" selama empat tahun berturut-turut (2022–2025) setelah sebelumnya berada di angka 80 pada tahun 2021.

Faktor Pendukung: Keberhasilan ini didukung oleh efektivitas Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.128.905.555 (99,95%).

3) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah.**

Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Realisasi 2025: 75,25 (Predikat: BB). Capaian Kinerja: 100,00% dari target 75,25.

Analisis Perbandingan:

Tahun Lalu (2024): Meningkat signifikan dari realisasi tahun 2024 yang sebesar 72,86. Beberapa Tahun Terakhir: Menunjukkan pemulihan dan peningkatan performa manajemen kinerja setelah sempat fluktuatif di tahun 2021 (71,07), 2022 (74,00), dan 2023 (70,91).

4) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik.**

Indikator Kinerja A: Indeks Pembangunan Statistik (IPS). Realisasi 2025: n/a (Data Tidak Tersedia).

Analisis:

Penilaian tidak dilaksanakan pada tahun 2025 berdasarkan Surat BPS Nomor B-236/02000/TS.160/2025. Sebagai perbandingan, realisasi tahun 2024 adalah 2,33.

Indikator Kinerja B: Indeks Satu Data Indonesia (SDI). Realisasi 2025: 42,65. Capaian Kinerja: 142,16% dari target 30.

Analisis Perbandingan:

Terjadi lonjakan performa yang sangat tinggi dibandingkan tahun 2024 yang hanya sebesar 29,10. Capaian tahun 2025 merupakan lompatan kinerja terbesar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Berikut adalah penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara tahun 2025, yang membandingkan realisasi saat ini dengan target jangka menengah (Renstra):

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERIODE AKHIR RENSTRA	REALISASI TAHUN 2025
1	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,2 (Baik)	2,74 (Baik)
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	90 (Informatif)	90 (Informatif)
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	75,50 (BB)	75,25 (BB)
4	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,65 (Baik)	n/a
		Indeks Satu Data Indonesia (SDI)	55 (Cukup)	42,65 (Kurang)

Analisis ini bertujuan untuk melihat sejauh mana progres pencapaian target jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan Strategis (Renstra) dibandingkan dengan realisasi hingga tahun 2025.

1) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**

Indikator Kinerja: Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Target Renstra (Jangka Menengah): 2,70. Realisasi s.d. Tahun 2025: 2,74.

Analisis Capaian:

Realisasi tahun 2025 telah melampaui (101,48%) target jangka menengah yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan akselerasi transformasi digital yang sangat efektif melalui dukungan Program Pengelolaan Aplikasi Informatika dengan realisasi anggaran sebesar Rp749.578.636.

2) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

Indikator Kinerja: Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Target Renstra (Jangka Menengah): 90. Realisasi s.d. Tahun 2025: 90.

Analisis Capaian:

Organisasi berhasil mencapai 100% target jangka menengah dan mempertahankannya sejak tahun 2022. Capaian ini didukung oleh efisiensi Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik yang menyerap anggaran sebesar Rp3.128.905.555.

3) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah**

Indikator Kinerja: Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.

Target Renstra (Jangka Menengah): 75,25. Realisasi s.d. Tahun 2025: 75,25.

Analisis Capaian:

Capaian kinerja telah mencapai 100% dari target jangka menengah. Tren menunjukkan kenaikan positif dari tahun 2021 (71,07) hingga mencapai target tertinggi di tahun 2025 dengan predikat "BB".

4) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik**

Indikator Kinerja A: Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Target Renstra: 2,40. Realisasi 2025: *n/a*.

Penjelasan:

Penilaian EPSS diadakan oleh BPS pada tahun 2025 berdasarkan Surat BPS Nomor B-236/02000/TS.160/2025. Capaian terakhir di tahun 2024 adalah 2,33.

Indikator Kinerja B: Indeks Satu Data Indonesia (SDI)

Target Renstra (Jangka Menengah): 30. Realisasi s.d. Tahun 2025: 42,65.

Analisis Capaian:

Realisasi telah melampaui target jangka menengah secara signifikan (142,16%). Peningkatan drastis dari tahun 2024 (29,10) menuju 2025 (42,65) menunjukkan keberhasilan dalam penguatan tata kelola data sektoral.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berikut adalah penyajian capaian kinerja organisasi untuk setiap sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara tahun 2025, lengkap dengan analisis penyebab keberhasilan, kendala, dan solusi yang telah dilakukan.

1) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Realisasi 2025: 2,74 (Kategori: Baik). Capaian Kinerja: 101,48% terhadap target 2,70.

Analisis Penyebab Keberhasilan:

- Tersedianya Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang komprehensif.
- Tersedianya Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang memadai.
- Tersedianya Layanan Publik Berbasis Elektronik yang memudahkan akses masyarakat.
- Didukung oleh realisasi anggaran Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp749.578.636.

Kendala: Adanya hambatan teknis berupa keterbatasan kapasitas server, gangguan jaringan pada titik-titik tertentu, serta masih kurangnya SDM fungsional (Pranata Komputer).

Alternatif Solusi: Melakukan optimalisasi infrastruktur yang ada dan mengusulkan penambahan SDM fungsional ahli di tahun mendatang.

2) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

Realisasi 2025: 90 (Kategori: Informatif). Capaian Kinerja: 100,00% terhadap target 90.

Analisis Penyebab Keberhasilan:

Konsistensi dalam pelayanan informasi publik melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan realisasi anggaran Rp3.128.905.555 (99,95%).

Kendala: Dinamika penyebaran informasi yang cepat menuntut pembaruan konten yang lebih akseleratif.

3) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Realisasi 2025: 75,25 (Predikat: BB). Capaian Kinerja: 100,00% terhadap target 75,25.

Analisis Penyebab Keberhasilan:

Perbaikan tata kelola internal yang tercermin pada penyerapan anggaran Program Penunjang sebesar 98,40% (Rp7,75 Miliar).

4) Sasaran Strategis: **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik**

Indikator Kinerja A: Indeks Satu Data Indonesia (SDI)

Realisasi 2025: 42,65. Capaian Kinerja: 142,16% terhadap target 30.

Analisis Penyebab Keberhasilan:

- Internal: Terpenuhinya manajemen arsitektur data, integrasi portal data Kabupaten Batu Bara dengan portal SDI Nasional, kepemilikan akun penyelenggara SDI, serta kepatuhan jadwal pemutakhiran data oleh Produsen Data.
- Internal: Tersedianya SOP turunan pusat, penunjukan resmi penyelenggara SDI daerah, dan regulasi lokal yang kuat.

- Eksternal: Dukungan penuh dari seluruh OPD di Kabupaten Batu Bara dalam memberikan data sektoral, serta penguatan melalui Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 103 Tahun 2022.

Indikator Kinerja B: Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Realisasi 2025: *n/a*.

Kendala Eksternal: Adanya efisiensi anggaran di Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2025 tidak dilaksanakan.

Alternatif Solusi/Tindak Lanjut:

- Menggunakan hasil EPSS tahun 2024 (nilai 2,33) sebagai dasar pengukuran kinerja sesuai arahan BPS.
- Akan dilaksanakan Forum Satu Data tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 untuk menargetkan kenaikan IPS menjadi 2,50 sekaligus mendongkrak Indeks SDI di tahun 2026.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi dilakukan untuk mengukur sejauh mana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara menggunakan sumber daya (anggaran dan SDM) dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

Secara umum, organisasi menunjukkan tingkat efisiensi yang sangat baik, di mana pencapaian kinerja (Output/Outcome) melampaui atau sama dengan persentase penyerapan anggaran.

Tabel 3.4
Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	REALISASI ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI
1	Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	101,48	97,58	Sangat Efisien
2	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	100	99,95	Efisien
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah	100	98,40	Efisien
4		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	142,16	97,58	

	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	Indeks Satu Data Indonesia (SDI)			Sangat Efisien
--	---	----------------------------------	--	--	----------------

Sasaran Kualitas Statistik (SDI): Merupakan sasaran paling efisien. Dengan alokasi anggaran program yang relatif kecil (Rp51.131.000), organisasi mampu menghasilkan capaian kinerja 142,16%. Efisiensi ini tercapai karena pemanfaatan regulasi Perbup No. 103/2022 dan integrasi portal yang memangkas biaya koordinasi fisik.

Sasaran SPBE: Penggunaan anggaran sebesar Rp749.578.636 berhasil mendongkrak indeks melampaui target jangka menengah (2,74 dari target 2,70). Hal ini menunjukkan value for money yang tinggi pada belanja teknologi informasi.

Berdasarkan data kepegawaian, Dinas Komunikasi dan Informatika didukung oleh 34 orang personil (terdiri dari Pejabat Struktural, Jabatan Fungsional, dan Penata Layanan Operasional). Analisis efisiensi SDM menunjukkan:

- **Beban Kerja Tinggi:** Meskipun menghadapi kendala kurangnya SDM fungsional spesifik (Pranata Komputer/Statistisi), organisasi mampu mengoptimalkan 34 personil yang ada untuk mengelola seluruh urusan komunikasi, informatika, persandian, dan statistik.
- **Produktivitas:** Penempatan tenaga "Penata Layanan Operasional" terbukti efektif dalam mendukung operasionalitas program teknis, sehingga target-target strategis tetap tercapai tepat waktu.

Organisasi berhasil melakukan penghematan pada beberapa sub-kegiatan administratif, sehingga alokasi dana dapat dialihkan untuk mendukung kinerja utama. Beberapa contoh efisiensi biaya satuan (unit cost) yang tercapai adalah:

- **Penyusunan Dokumen Perencanaan:** Berhasil diselesaikan dengan biaya efisien sebesar Rp900.000,00 per dokumen.
- **Evaluasi Kinerja:** Hanya membutuhkan biaya Rp450.000,00 per laporan melalui optimalisasi rapat internal.

- Manajemen Arsitektur Data: Efisiensi tercapai melalui sistem integrasi portal, sehingga biaya pengumpulan data dari OPD lain dapat ditekan seminimal mungkin melalui sistem digital (*Paperless*).

Secara keseluruhan, penggunaan sumber daya pada tahun 2025 dikategorikan Sangat Efisien. Keterbatasan sarana (server/jaringan) dan SDM fungsional tidak menghambat pencapaian target, melainkan mendorong organisasi untuk melakukan inovasi prosedur dan integrasi sistem yang lebih hemat biaya.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara tahun 2025 didukung oleh realisasi berbagai program dan kegiatan sebagai berikut:

1) Sasaran: **Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Program Penunjang: Program Pengelolaan Aplikasi Informatika & Program Penyelenggaraan Persandian.

Kegiatan Kunci: Pengembangan aplikasi layanan publik dan pengelolaan Data Center.

Analisis: Keberhasilan melampaui target (Realisasi 2,74 dari Target 2,70) sangat dipengaruhi oleh Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.378.340.169. Investasi pada perangkat keras server dan jaringan fiber optik secara langsung menyelesaikan kendala infrastruktur TI yang dihadapi pada tahun sebelumnya.

2) Sasaran: **Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik**

Program Penunjang: Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Kegiatan Kunci: Penguatan kapasitas PPID dan Kemitraan dengan Media Massa.

Analisis: Capaian skor 90 (Informatif) didorong oleh realisasi anggaran sebesar Rp3.128.905.555 (99,95%). Tingginya intensitas kegiatan penyebaran informasi melalui media cetak dan elektronik memastikan hak publik atas informasi terpenuhi secara maksimal.

3) Sasaran: **Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik**

Program Penunjang: Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Kegiatan Kunci: Koordinasi Satu Data Indonesia dan penyusunan metadata statistik.

Analisis: Lompatan kinerja pada Indeks SDI (42,65) merupakan hasil dari efektivitas kegiatan Forum Satu Data dan sinkronisasi data antar OPD. Meskipun anggaran kegiatannya paling kecil (Rp51.131.000), program ini memberikan dampak paling signifikan terhadap peningkatan indeks dibandingkan tahun 2024.

4) Sasaran: **Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**

Program Penunjang: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

Kegiatan Kunci: Penyediaan gaji ASN dan penunjang operasional kantor.

Analisis: Keberhasilan mencapai predikat "BB" didorong oleh ketertiban administrasi. Realisasi pembayaran gaji kepada 34 orang personil sebesar Rp2,5 Miliar dan penyediaan sarana kantor yang memadai memastikan ritme kerja organisasi tetap stabil untuk mendukung program teknis lainnya.

Kegagalan penilaian pada Indeks IPS (karena faktor eksternal kebijakan BPS) tidak menghambat keberhasilan program statistik secara keseluruhan. Strategi organisasi untuk mengalihkan fokus pada penguatan Program Satu Data Indonesia terbukti menjadi keputusan yang tepat untuk tetap menjaga performa kinerja organisasi di mata publik dan pimpinan daerah.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada tahun anggaran 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara didukung oleh total pagu anggaran sebesar Rp.11.997.567.273. Hingga akhir periode, organisasi menunjukkan tingkat akuntabilitas keuangan yang sangat tinggi dengan merealisasikan anggaran sebesar Rp.11.846.800.810 atau mencapai persentase penyerapan 98,74%.

Tabel 3.5
Realisasi Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2024

NO.	URAIAN	RENCANA	RELISASI	%
1	Belanja Pegawai	2.938.339.244	2.904.352.525	98,84
2	Belanja Barang dan Jasa	6.525.195.029	6.414.936.180	98,31
3	Belanja Hibah	35.000.000	35.000.000	100,00
4	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.489.034.000	2.482.522.105	99,92

5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.999.000	9.990.000	99,91
	JUMLAH	11.997.567.273	11.846.800.810	98,74

Dukungan finansial tersebut telah dialokasikan secara strategis untuk mewujudkan sasaran kinerja utama sebagai berikut:

1) Belanja Operasi (Realisasi Rp9.354.288.705,00 / 98,48%)

Komponen ini merupakan pilar utama dalam menjalankan operasional rutin dan kegiatan teknis organisasi.

- Belanja Pegawai (Rp2,90 Miliar): Digunakan untuk menjamin produktivitas 34 personil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, sehingga target manajemen internal seperti Nilai AKIP (75,25) dapat tercapai dengan predikat BB.
- Belanja Barang dan Jasa (Rp6,41 Miliar): Dialokasikan untuk program-program krusial seperti Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Hal ini menjadi kunci keberhasilan organisasi dalam mempertahankan Predikat KIP "Informatif" (Skor 90) serta mendorong lompatan besar pada Indeks Satu Data Indonesia (SDI) hingga mencapai 42,65.

2) Belanja Modal (Realisasi Rp2.492.512.105,00 / 99,74%)

Realisasi belanja modal yang hampir mencapai 100% ini difokuskan pada pengadaan peralatan dan mesin serta infrastruktur teknologi informasi. Penggunaan anggaran modal ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas layanan digital daerah, yang dibuktikan dengan pencapaian Indeks SPBE sebesar 2,74, melampaui target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja maupun target jangka menengah (2,70).

Terdapat peningkatan realisasi anggaran sebesar Rp3.335.141.294,00 dibandingkan tahun 2024 (Rp8,51 Miliar). Kenaikan alokasi ini terbukti efektif dan bukan merupakan pemborosan, karena diikuti dengan peningkatan signifikan pada indikator-indikator strategis, terutama pada sektor transformasi digital dan tata kelola data.

Penggunaan anggaran tahun 2025 telah dilakukan secara efisien dan berorientasi pada hasil (outcome-oriented). Anggaran tidak hanya terserap

secara maksimal, tetapi juga secara nyata berhasil mewujudkan seluruh pernyataan kinerja sasaran strategis yang telah dijanjikan oleh organisasi kepada masyarakat dan pimpinan daerah.

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Batu Bara Berdasarkan Program Kegiatan Dan Subkegiatan Tahun Anggaran 2025

SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%	
Meningkatnya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	765.993.600	749.578.636	97,86
	1.1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	765.993.600	749.578.636	97,86
	1.1.1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	72.793.600	70.125.000	96,33
	1.1.2	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	279.000.000	279.000.000	100,00
	1.1.3	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	273.004.000	271.571.000	99,48
	1.1.4	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40.000.000	39.627.000	99,07
	1.1.5	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	5.292.000	4.727.000	89,32
	1.1.6	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	95.904.000	84.528.636	88,14
	2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	171.625.000	165.304.475	96,32
	2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	171.625.000	165.304.475	96,32
2.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	171.625.000	165.304.475	96,32	
Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	3	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	3.130.340.550	3.128.905.555	99,95
	3.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.130.340.550	3.128.905.555	99,95
	3.1.1	Relasi Media	1.570.800.000	1.570.760.000	100,00

	3.1.2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	53.822.000	53.582.000	99,55
	3.1.3	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	230.000.000	229.200.000	99,65
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Statistik	4	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	51.500.000	51.131.000	99,28
	4.1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	51.500.000	51.131.000	99,28
	4.1.1	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional	51.500.000	51.131.000	99,28
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.878.108.123	7.751.881.144	98,40
	5.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.350.000	1.350.000	100,00
	5.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	900.000	900.000	100,00
	5.1.2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	450.000	450.000	100,00
	5.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.939.914.244	2.905.882.525	98,84
	5.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.938.339.244	2.904.352.525	98,84
	5.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.575.000	1.530.000	97,14
	5.3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	446.331.357	443.981.800	99,47
	5.3.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.447.760	2.447.500	99,99
	5.3.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.463.373	35.446.000	99,95
	5.3.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.552.000	53.508.000	96,32
	5.3.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.580.224	3.575.000	99,85
	5.3.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	173.400.000	173.340.000	99,97
	5.3.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.888.000	175.665.300	99,87
	5.4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.447.273.000	2.423.486.819	99,03
	5.4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	85.440.000	67.099.650	78,53
	5.4.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.361.833.000	2.356.387.169	99,77

	5.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.660.947.522	1.609.400.172	96,90
	5.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00
	5.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	155.827.522	124.940.172	80,18
	5.5.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.503.120.000	1.482.460.000	98,63
	5.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	382.292.000	367.779.828	96,20
	5.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	50.920.000	48.656.265	95,55
	5.6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	181.615.000	173.517.063	95,54
	5.6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.750.000	54.682.500	99,88
	5.6.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.007.000	90.924.000	95,70
		JUMLAH	11.997.567.273	11.846.800.810	98,74

Pencapaian sasaran strategis dalam peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pengamanan informasi menunjukkan performa yang sangat positif, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp937.618.600 dan tingkat penyerapan melampaui 96%. Akselerasi transformasi digital ini terefleksi secara optimal melalui realisasi 100% pada sub-kegiatan pengelolaan aplikasi informatika dan penyelenggaraan pusat kendali (*Command Center*). Meskipun demikian, terdapat deviasi minor pada sub-kegiatan koordinasi penyusunan rencana SPBE serta penyediaan akses internet, dengan capaian masing-masing sebesar 89,32% dan 88,14%. Fluktuasi tersebut tidak mengindikasikan kegagalan performa, melainkan lebih merepresentasikan bentuk efisiensi anggaran dalam kontrak layanan pihak ketiga maupun optimalisasi sumber daya yang tersedia.

Pada dimensi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik memegang peranan krusial sebagai pilar diseminasi informasi dengan alokasi anggaran signifikan sebesar Rp3,13 miliar. Integritas manajerial dalam sektor ini tercermin dari tingkat penyerapan yang hampir mencapai titik absolut, yakni sebesar 99,95%. Persentase yang sangat

tinggi ini mengonfirmasi komitmen strategis instansi dalam memperkuat transparansi publik dan menjembatani arus komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Keberhasilan ini didorong oleh efektivitas kemitraan media serta pengelolaan konten komunikasi publik yang dilaksanakan secara sistematis dan terukur guna menjamin hak informasi bagi warga negara.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah mendominasi struktur belanja dengan alokasi sebesar Rp7,87 miliar atau mencakup 65% dari total pagu anggaran, yang difokuskan pada penguatan stabilitas operasional internal. Komponen belanja pegawai, khususnya administrasi keuangan dan tunjangan ASN, menunjukkan konsistensi realisasi sebesar 98,84%, sementara sektor pengadaan aset infrastruktur kantor mencatatkan penyerapan yang mendekati 100%. Di sisi lain, terdapat indikasi efisiensi fiskal yang cukup menonjol pada pos pengadaan kendaraan dinas serta penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik, yang masing-masing hanya menyerap 78,53% dan 80,18% dari pagu yang tersedia. Fenomena ini mengindikasikan adanya kontrol pengeluaran yang ketat dan manajemen operasional yang berorientasi pada prinsip ekonomi tanpa mereduksi kualitas layanan administrasi perangkat daerah.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara pada Tahun Anggaran 2025, dapat ditarik beberapa simpulan utama sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Strategis: Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dari empat sasaran strategis, mayoritas indikator menunjukkan performa di atas 100%, dengan lompatan signifikan pada Indeks Satu Data Indonesia (SDI) yang mencapai 142,16% dari target.
2. Akselerasi Digital dan Transparansi: Dinas berhasil melampaui target Indeks SPBE (2,74) dan mempertahankan predikat KIP "Informatif" (Skor 90). Hal ini membuktikan bahwa transformasi digital dan keterbukaan informasi publik di Kabupaten Batu Bara berjalan secara konsisten dan akuntabel.
3. Akuntabilitas Tata Kelola: Peningkatan nilai AKIP menjadi 75,25 (BB) menunjukkan perbaikan manajemen kinerja internal yang semakin baik dari tahun ke tahun.
4. Efisiensi Anggaran: Keberhasilan kinerja ini didukung oleh penyerapan anggaran yang optimal sebesar 98,74% (Rp11,84 Miliar). Realisasi anggaran modal yang tepat sasaran terbukti mampu mengatasi hambatan infrastruktur TI dan mendorong tercapainya target-target jangka menengah (Renstra) lebih cepat dari yang direncanakan.
5. Kendala Eksternal: Satu-satunya indikator yang tidak dapat diukur (n/a) adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS) dikarenakan kebijakan Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat yang meniadakan evaluasi EPSS pada tahun 2025, namun hal ini tidak mengurangi kualitas penyelenggaraan statistik sektoral di daerah yang tetap berjalan optimal.

Guna meningkatkan kinerja dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Batu Bara merencanakan langkah-langkah strategis untuk tahun mendatang sebagai berikut:

1. Penguatan Statistik Sektor: Melaksanakan Forum Satu Data tingkat Kabupaten Batu Bara Tahun 2026 secara lebih intensif untuk mendongkrak Indeks IPS menuju target 2,50 serta memperkuat akurasi metadata statistik antar seluruh OPD.
2. Pengembangan Infrastruktur SPBE: Melakukan peningkatan (upgrade) kapasitas server dan perluasan jaringan fiber optik guna mengatasi hambatan teknis jaringan, serta memastikan keberlanjutan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
3. Optimalisasi SDM Aparatur: Mengusulkan penambahan dan peningkatan kompetensi tenaga fungsional spesifik, khususnya Pranata Komputer dan Statistisi, untuk mendukung beban kerja transformasi digital yang semakin kompleks.
4. Inovasi Layanan Publik: Mengembangkan integrasi layanan publik berbasis digital yang lebih *user-friendly* guna meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap akses informasi dan layanan pemerintah.
5. Penguatan Pengawasan Internal: Mempertahankan dan meningkatkan kualitas manajemen risiko dan sistem pengendalian internal untuk memastikan nilai AKIP tetap berada pada level yang sangat baik (BB ke atas).

Demikian Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Batu Bara. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan referensi bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.